

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah reformasi bergulir, *Good governance* menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam setiap pemerintahan. Untuk mencapai *good governance*, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang mana salah satunya adalah prinsip akuntabilitas. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan praktek *good governance* khususnya akuntabilitas untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Ardianto, 2014). Terkait dengan organisasi publik, akuntabilitas institusi pemerintah yang selanjutnya disebut akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi, maupun operasionalisasi/pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan (Supriyono, 2002) dalam (Hasibuan, 2010)

Akuntabilitas ini diyakini mampu merubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Berdasarkan definisi tersebut maka melalui akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tercipta sebuah mekanisme yang dapat memantau perilaku, tindak-tanduk dan kinerja dari pejabat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya.

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diantaranya yaitu kejelasan sasaran anggaran. Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintahan daerah, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2002).

Oleh karena itu anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya (Setiawan, 2013)

Penelitian (Darma, 2004) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun sebaliknya, penelitian (Pangumbalerang, 2014) mengatakan tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Menurut (Mahmudi, 2011) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing OPD. Penelitian (Sari, 2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penelitian yang dilakukan (Rohman, 2012) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan merupakan variabel *intervening* / variabel yang memediasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan penelitian (Desmiyawati, 2012) dan (Suwadirman, 2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan akuntabilitas keuangan juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah diwajibkan melaporkan kinerja keuangan yang telah dicapai periode tersebut. Akuntabilitas keuangan merupakan prioritas utama untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas keuangan yang baik biasanya dianggap memiliki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula.

Penelitian (Oktiandra, 2010) tentang pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aini, 2014) penerapan akuntabilitas keuangan (PAK) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian (Rohman, 2012) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel *Intervening* dengan penelitian (Fauzan, 2017) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya, yaitu kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern sebagai variabel bebas, penerapan akuntabilitas keuangan sebagai variabel *intervening* dan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai variabel terikat. Objek penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman mengambil objek pada OPD Kota Salatiga dan penelitian Rayhan Hady Fauzan mengambil objek pada OPD Kabupaten Lima Puluh Provinsi Sumatera Barat sedangkan dalam penelitian ini mengambil objek pada OPD Kota Tegal.

1.2. Rumusan Masalah

Kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktek-praktek penyimpangan dan tindakan kurang efisien yang dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga dengan adanya hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas dari pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan akuntabilitas keuangan?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas keuangan?
3. Bagaimana pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
4. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
5. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap penerapan akuntabilitas keuangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas keuangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian inntern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan akuntabilitas keuangan sebagai variabel *intervening*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi:

a Pemerintah

Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah daerah